

Pelatihan Penulisan Berita, Artikel, dan Opini untuk Penguatan Komunikasi Publik Kepemiluan di KPU Kabupaten Wonogiri

Farco Siswiyanto Raharjo¹, Galang Taufani^{2*}

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

^b Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

*Corresponding author: taufanigalang@gmail.com

Abstract

Purpose - This community engagement activity aimed to strengthen participants' capacity to write news reports, articles, and opinion pieces within the context of electoral public communication at the General Election Commission (KPU) of Wonogiri Regency. The program was grounded in the need for electoral public communication that is accurate, verifiable, neutral, and accessible to the public.

Design/Methodology/Approach- The training was conducted face-to-face in a single session in 2026 and consisted of initial needs mapping, interactive presentations, analysis of writing examples, guided practice, and reflective discussions. Data sources included facilitator notes, training materials, activity documentation, participants' responses during discussions, and exercises involving headlines, leads, opening paragraphs, argumentation, and information sources. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach focusing on the distinction among writing genres, completeness of the 5W+1H elements, source verification, and the separation of facts from opinions.

Findings - The available evidence indicates that the activity provided a structured environment for writing practice and directed participants' attention to accuracy, verification, writing structure, and institutional neutrality. The training also facilitated participants' understanding of the different characteristics of news reports, articles, and opinion pieces within electoral public communication. However, improvements in writing competence could not be quantified because the activity did not include a pre-test, post-test, scoring rubric, or complete participant attendance records.

Originality/Value - The program's principal contribution lies in contextualizing writing skills within the specific requirements of institutional electoral public communication. Rather than focusing solely on technical writing skills, the program integrated principles of accuracy, verification, neutrality, and the distinction between facts and opinions. It also generated recommendations for follow-up activities, including editorial clinics and the development of internal writing guidelines to support the continuous improvement of public communication quality at the KPU of Wonogiri Regency.

Keywords: Electoral Public Communication; Information Literacy; Writing Training; News Writing; General Election Commission

Abstrak

Purpose - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas penulisan berita, artikel, dan opini dalam konteks komunikasi publik kepemiluan di KPU Kabupaten Wonogiri. Program ini berangkat dari kebutuhan komunikasi publik kepemiluan yang menuntut informasi akurat, dapat diverifikasi, netral, dan mudah dipahami.

Design/Methodology/Approach- Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dalam satu pertemuan pada tahun 2026 melalui pemetaan kebutuhan awal, pemaparan interaktif, analisis contoh, praktik terbimbing, dan diskusi reflektif. Sumber data meliputi catatan fasilitator, materi pelatihan, dokumentasi kegiatan, respons peserta dalam diskusi, serta aktivitas latihan penyusunan judul, lead, paragraf pembuka, argumentasi, dan sumber informasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada kemampuan membedakan jenis tulisan, kelengkapan unsur 5W+1H, verifikasi sumber, serta pemisahan antara fakta dan opini.

Findings - Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa kegiatan berhasil menyediakan ruang latihan yang terstruktur dan mengarahkan perhatian peserta pada aspek akurasi, verifikasi, struktur tulisan, serta netralitas komunikasi kelembagaan. Pelatihan juga memfasilitasi pemahaman mengenai perbedaan karakteristik berita, artikel, dan opini dalam konteks komunikasi publik kepemiluan. Namun, peningkatan kompetensi menulis belum dapat dinyatakan secara kuantitatif karena kegiatan tidak dilengkapi pre-test, post-test, rubrik penilaian, maupun arsip lengkap jumlah peserta.

Originality/Value - Nilai utama program terletak pada kontekstualisasi keterampilan menulis ke dalam kebutuhan spesifik komunikasi publik kepemiluan di tingkat kelembagaan. Program ini tidak hanya menekankan aspek teknis penulisan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip akurasi, verifikasi, netralitas, dan pemisahan fakta serta

opini. Selain itu, kegiatan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut berupa pengembangan klinik editorial dan pedoman internal penulisan sebagai upaya memperkuat kualitas komunikasi publik KPU Kabupaten Wonogiri secara berkelanjutan.

Kata kunci: Komunikasi Publik Kepemiluan; Literasi Informasi; Pelatihan Menulis; Penulisan Berita; KPU.

Manuscript received : 17-10-2025; revised : 29-12-2025; accepted : 17-01-2026. Date of publication 26-01-2026

©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



I. PENDAHULUAN

Komunikasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemilihan umum karena kualitas informasi memengaruhi kemampuan warga memahami tahapan, aturan, hak, kewajiban, dan pilihan partisipasi politik. Pemilu bukan hanya prosedur konversi suara menjadi kekuasaan, tetapi juga arena informasi yang memungkinkan warga mengevaluasi aktor dan proses politik (Powell, 2000). Dalam konteks Indonesia, prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menempatkan keterbukaan serta akurasi informasi sebagai prasyarat penting bagi penyelenggaraan yang dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 2017).

Kebutuhan tersebut semakin kompleks dalam lingkungan media digital. Kajian sistematis menunjukkan bahwa media digital dapat memperluas konsumsi informasi dan partisipasi politik, tetapi pada saat yang sama berkaitan dengan penurunan kepercayaan, polarisasi, serta paparan informasi bermasalah pada konteks tertentu (Lorenz-Spreen et al., 2023). Misinformasi juga dapat memengaruhi penilaian dan perilaku politik, termasuk dalam konteks pemilu (Green et al., 2022). Karena itu, perhatian terhadap akurasi, verifikasi, dan kualitas sumber bukan sekadar persoalan teknis editorial, tetapi bagian dari ketahanan informasi demokratis (Ecker et al., 2022; Pennycook & Rand, 2021).

Bagi lembaga pemerintah, komunikasi publik harus mempertemukan kepentingan kelembagaan dengan kebutuhan informasi warga. Penelitian mengenai komunikasi pemerintah menekankan pentingnya ketepatan waktu, kejelasan, transparansi, serta keterlibatan publik (Arifin, 2022; Fissi et al., 2022). Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah di media sosial perlu dibaca sebagai praktik yang mencakup pengirim, pesan, saluran, audiens, dan efek, sehingga mutu teks institusional tidak dapat dipisahkan dari konteks pelayanan publiknya (Hansson & DePaula, 2025). Dalam konteks KPU, kerangka partisipasi masyarakat menegaskan peran sosialisasi, pendidikan pemilihan, dan komunikasi kelembagaan sebagai bagian dari ekosistem penyelenggaraan pemilu (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022).

Pemetaan kebutuhan awal kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan KPU Kabupaten Wonogiri yang menjadi dasar penyusunan materi. Dari koordinasi dan dinamika diskusi pada awal pelatihan, kebutuhan program dipusatkan pada tiga persoalan operasional. Pertama, peserta perlu membedakan fungsi berita sebagai penyampaian fakta, artikel sebagai penjelasan analitis, dan opini sebagai argumentasi. Kedua, tulisan kegiatan perlu diperkuat melalui kelengkapan unsur 5W+1H dan pemeriksaan fakta penting, seperti nama, jabatan, tanggal, regulasi, angka, dan kutipan. Ketiga, batas antara fakta, interpretasi, dan opini perlu dijaga agar komunikasi kelembagaan tetap netral dan tidak menimbulkan kesan keberpihakan. Identifikasi ini tidak berasal dari tes diagnostik kuantitatif, sehingga diposisikan sebagai pemetaan kebutuhan kualitatif, bukan pengukuran kemampuan awal.

Keterampilan menulis dalam komunikasi kelembagaan membutuhkan latihan, analisis contoh, dan umpan balik, bukan hanya ceramah. Prinsip jurnalistik menempatkan verifikasi sebagai disiplin inti dan menuntut konsistensi antara fakta, sumber, judul, serta isi (Kovach & Rosenstiel, 2014). Di Indonesia, akurasi, keberimbangan, pengujian informasi, serta pemisahan fakta dan opini juga ditekankan dalam Kode Etik Jurnalistik dan pedoman profesional pers (Dewan Pers, 2006, 2024). Walaupun publikasi KPU bukan seluruhnya produk pers dalam arti yuridis, prinsip-prinsip tersebut relevan sebagai rujukan etik karena informasi yang diproduksi berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Literasi informasi memperkuat kemampuan untuk menilai sumber dan membedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasi yang menyesatkan. Jones-Jang et al. (2021) menemukan bahwa literasi informasi berhubungan dengan kemampuan mengidentifikasi berita palsu, sedangkan penelitian eksperimental menunjukkan bahwa mengarahkan perhatian pada akurasi dapat mengurangi kecenderungan membagikan informasi bermasalah (Pennycook et al., 2021). Intervensi news literacy juga menunjukkan bahwa pesan literasi perlu dirancang hati-hati dan dihubungkan dengan praktik verifikasi yang nyata (Vraga et al., 2022). Dalam komunikasi kepemiluan, implikasinya adalah bahwa pelatihan menulis perlu menggabungkan teknik editorial dengan disiplin sumber, verifikasi, dan tanggung jawab institusional.

Sejumlah program pengabdian menunjukkan manfaat pelatihan menulis ketika peserta memperoleh praktik langsung. Muadz dan Riyanto (2022) menggunakan tahapan identifikasi masalah, pelatihan penulisan siaran pers, dan evaluasi, sedangkan Suryanto et al. (2024) menerapkan service learning yang mengombinasikan pra-implementasi, pelatihan, dan pasca-implementasi dalam penulisan berita website. Namun, konteks komunikasi kepemiluan memiliki kekhasan berupa tuntutan netralitas, ketepatan regulasi, sensitivitas politik, dan risiko pencampuran fakta-opini. Penelitian tentang strategi komunikasi pemerintah juga menunjukkan bahwa legitimasi pesan publik lebih kuat ketika didukung bukti dan argumentasi yang jelas, bukan semata-mata rujukan pada otoritas atau nilai bersama (Hansson & Page, 2023; Jamalullail et al., 2023).

Atas dasar itu, kebaruan kegiatan ini tidak diletakkan pada metode pelatihan yang pada dasarnya umum, melainkan pada kontekstualisasi materi menjadi kerangka editorial untuk komunikasi publik kepemiluan: penentuan tujuan teks, kelengkapan informasi, verifikasi sumber, serta netralitas fakta-opini. Kegiatan bertujuan (1) memberikan kerangka yang lebih jelas untuk membedakan berita, artikel, dan opini; (2) melatih penggunaan 5W+1H dan verifikasi sumber; (3) menegaskan batas etik dan netralitas dalam penulisan kepemiluan; dan (4) merumuskan kebutuhan tindak lanjut berupa pendampingan editorial dan pedoman internal. Karena tidak tersedia desain pre-test-post-test, artikel ini tidak mengajukan klaim peningkatan kompetensi secara kuantitatif.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan sebagai pelatihan singkat tatap muka di ruang pertemuan KPU Kabupaten Wonogiri pada tahun 2026 dalam satu pertemuan. Peserta merupakan pihak yang mengikuti kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri. Arsip yang tersedia untuk penyusunan artikel ini tidak memuat daftar hadir lengkap maupun catatan durasi menit, sehingga jumlah, komposisi peserta, dan durasi rinci tidak digunakan sebagai dasar analisis atau klaim hasil. Keterbatasan dokumentasi tersebut dinyatakan secara terbuka untuk menghindari rekonstruksi data yang tidak dapat diverifikasi.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama pihak KPU Kabupaten Wonogiri untuk menyelaraskan tema, kebutuhan materi, karakter kegiatan, dan fasilitas. Berdasarkan pemetaan kebutuhan kualitatif tersebut, tim menyusun materi mengenai fungsi komunikasi publik kepemiluan, karakter berita, artikel, dan opini, kelengkapan 5W+1H, struktur judul dan lead, penggunaan sumber, verifikasi informasi, pemisahan fakta-opini, serta etika dan netralitas komunikasi kelembagaan. Prinsip 5W+1H dan struktur berita digunakan sebagai alat praktis untuk mengurangi informasi yang terlalu seremonial atau tidak lengkap (Sumadiri, 2017), sedangkan latihan menulis diposisikan sebagai keterampilan produktif yang berkembang melalui praktik dan pengorganisasian gagasan (Tarigan, 2013).

Pelaksanaan menggunakan empat teknik utama: pemaparan interaktif, analisis contoh, diskusi-tanya jawab, dan praktik terbimbing. Pemaparan memberikan kerangka konseptual; analisis contoh digunakan untuk membedakan fakta, interpretasi, opini, judul, lead, dan sumber; praktik terbimbing diarahkan pada penyusunan atau perbaikan bagian tulisan; sedangkan diskusi reflektif digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan penerapan dalam komunikasi kepemiluan. Secara konseptual, desain komunikasi mempertimbangkan unsur pengirim, pesan, saluran, penerima, dan efek sebagaimana kerangka Lasswell (1948) serta hubungan media dan komunikasi politik dalam institusi modern (McNair, 2018).

Data yang digunakan dalam artikel berupa catatan fasilitator selama diskusi dan praktik, bahan presentasi, dokumentasi foto, respons lisan peserta, serta aktivitas latihan yang mencakup penyusunan judul, lead, paragraf pembuka, argumentasi, dan identifikasi sumber informasi. Untuk penulisan artikel, bukti tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui empat indikator proses: (1) pembedaan fungsi berita, artikel, dan opini; (2) penerapan 5W+1H pada informasi kegiatan; (3) perhatian terhadap sumber dan verifikasi; serta (4) pemisahan fakta, interpretasi, dan opini dalam konteks netralitas kelembagaan. Indikator ini digunakan sebagai kerangka analisis proses, bukan sebagai rubrik skor kompetensi.

Keberhasilan program dalam artikel ini didefinisikan secara terbatas sebagai keterlaksanaan tahapan pelatihan dan munculnya bukti proses yang relevan pada keempat indikator tersebut. Kegiatan tidak menggunakan pre-test, post-test, skor rubrik, kelompok pembandingan, atau evaluasi tindak lanjut. Karena itu, analisis tidak menghitung persentase peningkatan, effect size, maupun ketuntasan peserta. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip kehati-hatian metodologis: partisipasi aktif dan dokumentasi pelaksanaan dapat mendukung klaim keterlaksanaan, tetapi tidak cukup untuk membuktikan peningkatan kompetensi.

Tabel 1. Tahapan Pelatihan, Aktivitas, dan Bukti yang Digunakan dalam Analisis

Tahap	Aktivitas utama	Bukti tersedia	Output proses
Pemetaan kebutuhan	Koordinasi dengan mitra dan identifikasi fokus materi	Catatan koordinasi dan fokus kebutuhan	Rumusan masalah pelatihan
Penyusunan materi	Menyiapkan materi berita, artikel, opini, 5W+1H, verifikasi, netralitas	Bahan presentasi	Materi intervensi kontekstual
Pemaparan & analisis contoh	Penjelasan konsep dan pembacaan contoh teks	Dokumentasi dan catatan diskusi	Kriteria pembedaan jenis tulisan
Praktik terbimbing	Latihan judul, lead, paragraf pembuka, argumentasi, sumber	Catatan fasilitator dan aktivitas latihan	Bagian tulisan untuk dibahas
Evaluasi reflektif	Tanya jawab, pembahasan kendala, dan rekomendasi	Respons diskusi dan dokumentasi	Kebutuhan tindak lanjut

Sumber: disusun dari dokumen dan dokumentasi kegiatan pengabdian, 2026

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Identifikasi Kebutuhan dan Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan dilaksanakan dalam format tatap muka dan dialogis. Pada tahap awal, diskusi diarahkan untuk menilai bagaimana peserta membedakan tiga bentuk tulisan yang sering digunakan dalam komunikasi publik. Catatan kegiatan menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak berhenti pada tata bahasa, tetapi menyangkut fungsi teks: tulisan informatif dapat memuat penilaian tanpa disadari, sementara opini dapat kehilangan kekuatan ketika tidak memiliki dasar faktual. Temuan proses ini menguatkan keputusan untuk menjadikan tujuan teks sebagai titik awal pelatihan: apakah tulisan bertujuan melaporkan fakta, menjelaskan persoalan, atau membangun argumentasi.

Pendekatan tersebut relevan dengan komunikasi publik karena kejelasan tujuan, audiens, dan pesan merupakan prasyarat agar informasi kelembagaan tidak menimbulkan tafsir yang tidak diinginkan. Dalam literatur komunikasi pemerintah, efektivitas komunikasi berkaitan dengan kemampuan lembaga menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan audiens dan konteks saluran (Fissi et al., 2022; Hansson & DePaula, 2025). Pada isu kepemiluan, kehati-hatian menjadi lebih penting karena informasi yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi dapat berkontribusi pada kebingungan, misinformasi, dan penurunan kepercayaan (Ecker et al., 2022; Green et al., 2022)



Gambar 1. Dialog tatap muka pada tahap identifikasi dan pembahasan masalah penulisan kepemiluan.

Sumber: Dokumentasi kegiatan pengabdian di KPU Kabupaten Wonogiri, 2026.

Bukti Proses pada Latihan Penulisan

Latihan berita menggunakan 5W+1H untuk memeriksa kelengkapan informasi dan menghubungkannya dengan konsistensi antara judul, lead, dan fakta inti. Fokusnya bukan membuat judul sensasional, melainkan memastikan bahwa judul mewakili isi dan bahwa informasi mengenai nama, jabatan, waktu, lokasi, angka, regulasi, serta kutipan dapat diperiksa. Prinsip ini sejalan dengan

disiplin verifikasi dalam jurnalisme (Kovach & Rosenstiel, 2014) dan dengan temuan bahwa perhatian eksplisit pada akurasi dapat memperbaiki kualitas keputusan berbagi informasi (Pennycook et al., 2021).

Pada latihan artikel, peserta diarahkan untuk mengubah informasi regulatif atau kegiatan yang singkat menjadi penjelasan yang memiliki konteks, hubungan antarparagraf, dan alur yang lebih jelas. Pada latihan opini, penekanan dialihkan pada hubungan antara tesis, alasan, bukti, dan kesimpulan. Batas etik menjadi bagian penting karena komunikasi kelembagaan KPU tidak dapat diposisikan seperti opini partisan. Prinsip netralitas, akurasi, pengujian informasi, dan pemisahan fakta dari opini yang menghakimi digunakan sebagai rambu penyuntingan (Dewan Pers, 2006, 2024).

Bukti yang tersedia terutama menunjukkan keterlaksanaan proses, bukan perubahan skor. Dokumentasi memperlihatkan pemaparan, analisis contoh, dan interaksi dua arah, sedangkan catatan fasilitator menunjukkan bahwa diskusi bergerak dari definisi umum menuju persoalan operasional seperti kelengkapan informasi, sumber, judul, dan batas fakta-opini. Dengan demikian, klaim yang dapat dipertahankan adalah bahwa pelatihan menyediakan kerangka kerja dan kesempatan praktik yang terstruktur. Klaim bahwa kompetensi peserta meningkat belum dapat dibuat karena tidak ada perbandingan produk sebelum-sesudah atau rubrik penilaian tertulis.



Gambar 2. Pemaparan dan analisis contoh struktur tulisan untuk menghubungkan konsep dengan praktik publikasi.

Sumber: Dokumentasi kegiatan pengabdian di KPU Kabupaten Wonogiri, 2026.

Tabel 2. Indikator Proses, Bukti yang Tersedia, dan Batas Interpretasi

Indikator	Bukti yang tersedia	Interpretasi yang dapat dipertahankan
Pembedaan berita, artikel, opini	Diskusi tentang fungsi teks dan analisis contoh	Menunjukkan fokus masalah dan proses klarifikasi; tidak mengukur tingkat penguasaan per peserta
Kelengkapan 5W+1H	Latihan memeriksa informasi dan struktur judul-lead	Membuktikan materi dipraktikkan; tidak tersedia skor kualitas produk
Verifikasi sumber	Pembahasan nama, jabatan, tanggal, regulasi, angka, dan kutipan	Menunjukkan perhatian pada akurasi; tidak ada audit publikasi sebelum-sesudah
Fakta, interpretasi, dan opini	Latihan identifikasi serta diskusi batas etik dan netralitas	Mendukung proses literasi informasi; tidak membuktikan perubahan perilaku jangka panjang
Partisipasi dan refleksi	Tanya jawab dan dokumentasi interaksi	Mendukung keterlaksanaan kegiatan; partisipasi tidak disamakan dengan peningkatan kompetensi

Sumber: analisis deskriptif dokumentasi kegiatan, 2026



Gambar 3. Sesi tanya jawab sebagai bagian evaluasi reflektif untuk mengidentifikasi kendala penerapan materi.

Sumber: Dokumentasi kegiatan pengabdian di KPU Kabupaten Wonogiri, 2026

PEMBAHASAN

Kontribusi Program terhadap Komunikasi Publik Kepemiluan

Kontribusi utama kegiatan terletak pada penggabungan empat unsur editorial yang biasanya dibahas terpisah: tujuan jenis tulisan, kelengkapan informasi, verifikasi sumber, dan netralitas fakta-opini. Dalam pelatihan menulis umum, fokus sering berada pada struktur teks dan keterampilan bahasa. Program ini menempatkan keterampilan tersebut di dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu, sehingga kualitas tulisan dipahami sebagai bagian dari pelayanan informasi publik dan bukan hanya kemampuan individual penulis.

Kontekstualisasi ini sejalan dengan penelitian pengabdian yang menunjukkan bahwa latihan menulis menjadi lebih bermakna ketika berangkat dari kebutuhan publikasi nyata dan disertai praktik langsung (Muadz & Riyanto, 2022; Suryanto et al., 2024). Namun, komunikasi kepemiluan menambahkan tuntutan khusus berupa akurasi regulasi, sensitivitas politik, dan netralitas lembaga. Penelitian komunikasi pemerintah menekankan bahwa komunikasi yang efektif perlu responsif terhadap kebutuhan informasi warga dan menghindari ketergantungan pada legitimasi berbasis otoritas tanpa bukti yang memadai (Arifin, 2022; Hansson & Page, 2023).

Dari perspektif literasi informasi, latihan verifikasi juga penting karena kemampuan membedakan sumber yang andal berhubungan dengan kemampuan mengenali informasi bermasalah (Jones-Jang et al., 2021). News literacy tidak cukup berhenti pada pengetahuan konsep; ia perlu dihubungkan dengan tindakan konkret seperti pemeriksaan sumber, verifikasi konteks, dan kehati-hatian sebelum publikasi (Vraga et al., 2022). Karena itu, hasil program lebih tepat dipahami sebagai pembentukan kerangka praktik awal yang perlu dilanjutkan melalui pendampingan editorial, bukan sebagai bukti final peningkatan kompetensi.

Keterbatasan dan Rencana Keberlanjutan

Kegiatan memiliki beberapa keterbatasan substantif. Pertama, tidak tersedia pre-test dan post-test sehingga besarnya perubahan pengetahuan tidak dapat dihitung. Kedua, tidak digunakan rubrik penilaian produk sebelum dan sesudah pelatihan sehingga mutu tulisan tidak dapat dibandingkan secara sistematis. Ketiga, arsip yang digunakan untuk artikel tidak memuat daftar hadir lengkap dan durasi rinci, sehingga karakteristik peserta tidak dapat dilaporkan secara memadai. Keempat, kegiatan berlangsung satu kali dan tidak disertai evaluasi retensi atau tindak lanjut terhadap publikasi peserta. Kelima, foto dan keaktifan diskusi hanya merupakan bukti keterlaksanaan, bukan bukti efektivitas.

Keterbatasan tersebut mengarahkan rekomendasi tindak lanjut. KPU Kabupaten Wonogiri dapat mengembangkan klinik editorial berkala yang menggunakan publikasi nyata sebagai bahan review, pedoman internal singkat mengenai judul, lead, 5W+1H, rujukan regulasi, penggunaan sumber, keterangan foto, dan pemisahan fakta-opini, serta prosedur pemeriksaan fakta sebelum publikasi.

Program berikutnya perlu menggunakan daftar hadir, pre-test-post-test, rubrik kualitas tulisan, contoh produk sebelum-sesudah, dan evaluasi beberapa minggu setelah pelatihan. Desain seperti ini akan memungkinkan program pengabdian bergerak dari bukti proses menuju bukti dampak yang dapat diverifikasi.

IV. KESIMPULAN

Pelatihan penulisan berita, artikel, dan opini di KPU Kabupaten Wonogiri telah terlaksana sebagai kegiatan tatap muka yang menggabungkan pemaparan, analisis contoh, praktik terbimbing, dan diskusi reflektif. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa kegiatan menyediakan kerangka yang terstruktur untuk membahas fungsi tiga jenis tulisan, kelengkapan 5W+1H, verifikasi sumber, serta batas antara fakta dan opini dalam komunikasi kelembagaan. Kontribusi program terletak pada kontekstualisasi keterampilan menulis ke dalam tuntutan komunikasi publik kepemiluan, terutama akurasi, verifikasiabilitas, dan netralitas. Namun, efektivitas program dalam meningkatkan kompetensi menulis belum dapat ditentukan secara kuantitatif karena tidak tersedia pre-test, post-test, rubrik penilaian produk, dan arsip lengkap karakteristik peserta. Karena itu, tindak lanjut yang paling relevan adalah klinik editorial, pedoman penulisan internal, pemeriksaan fakta sebelum publikasi, serta evaluasi sebelum-sesudah pada program berikutnya agar perubahan kemampuan dapat dibuktikan secara lebih kuat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2022). Government communication strategies in time of pandemic: Comparative study between South Korea and Indonesia. *Policy & Governance Review*, 6(2), 189–205. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i2.546>
- Dewan Pers. (2006). Kode etik jurnalistik.
- Dewan Pers. (2023). Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/IV/2023 terkait pelaksanaan Pemilu 2024 dan peran pers dalam menjaga informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- Dewan Pers. (2024). Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional.
- Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Cook, J., Schmid, P., Fazio, L. K., Brashier, N., Kendeou, P., Vraga, E. K., & Amazeen, M. A. (2022). The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. *Nature Reviews Psychology*, 1, 13–29. <https://doi.org/10.1038/s44159-021-00006-y>
- Fissi, S., Gori, E., & Romolini, A. (2022). Social media government communication and stakeholder engagement in the era of COVID-19: Evidence from Italy. *International Journal of Public Sector Management*, 35(3), 276–293. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2021-0145>
- Green, J., Hobbs, W., McCabe, S., & Lazer, D. (2022). Online engagement with 2020 election misinformation and turnout in the 2021 Georgia runoff election. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(34), e2115900119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2115900119>
- Hansson, S., & DePaula, N. (2025). Government communication on social media: Research foci, domains, and future directions. *Media and Communication*, 13, Article 10697. <https://doi.org/10.17645/mac.10697>
- Hansson, S., & Page, R. (2023). Legitimation in government social media communication: The case of the Brexit department. *Critical Discourse Studies*, 20(4), 361–378. <https://doi.org/10.1080/17405904.2022.2058971>
- Jamalullail, J., Safira, F., & Hamdi, H. (2023). The government communication strategy through social media to increase public awareness. *Nyimak: Journal of Communication*, 7(2), 131–146. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v7i2.7985>
- Jones-Jang, S. M., Mortensen, T., & Liu, J. (2021). Does media literacy help identification of fake news? Information literacy helps, but other literacies don't. *American Behavioral Scientist*, 65(2), 371–388. <https://doi.org/10.1177/0002764219869406>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect* (3rd ed.). Crown.
- Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), *The communication of ideas* (pp. 37–51). Institute for Religious and Social Studies.
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, 7, 74–101. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1>
- McNair, B. (2018). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.
- Muadz, M., & Riyanto, B. (2022). Press release writing training in Sriwedari Village. *Community Empowerment*, 7(4), 629–633. <https://doi.org/10.31603/ce.5610>
- Pennycook, G., Epstein, Z., Mosleh, M., Arechar, A. A., Eckles, D., & Rand, D. G. (2021). Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online. *Nature*, 592, 590–595. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03344-2>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388–402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Powell, G. B., Jr. (2000). *Elections as instruments of democracy: Majoritarian and proportional visions*. Yale University Press.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
- Sumadiri, A. S. H. (2017). *Jurnalistik Indonesia: Menulis berita dan feature*. Simbiosis Rekatama Media.
- Suryanto, S., Syaputri, D., & Mahmudah, S. (2024). Pelatihan menulis berita di website kepada mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Islam Negeri Salatiga. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 1(3), 239–251. <https://doi.org/10.53088/tintamas.v1i3.1509>
- Tarigan, H. G. (2013). *Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa*. Angkasa.
- Vraga, E. K., Tully, M., & Bode, L. (2022). Assessing the relative merits of news literacy and corrections in responding to misinformation on Twitter. *New Media & Society*, 24(10), 2354–2371. <https://doi.org/10.1177/1461444821998691>